

NASIONALISME, IDENTITAS BANGSA, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:

Menelaah Pemikiran Walter Clemens Jr. dan James Mayall

Ryantori & Himsar Silaban
FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

Diawali dengan pemikiran Ernest Renan, seorang filsuf Prancis, pada sekitar akhir abad ke-19 mengenai arti *nation* (bangsa)—sekelompok orang yang hidup bersama membentuk suatu identitas berdasarkan pada kesamaan keinginan dan semangat, terlepas dari adanya kesamaan-kesamaan primordial, maka kemudian bermunculanlah negara-negara yang pada umumnya berlandaskan pada adanya keinginan untuk melepaskan diri dari kekuatan asing yang mendominasinya. Negara-negara seperti ini pada umumnya merupakan negara-negara bekas kolonialisme dan bersifat pluralis. Contoh dari negara yang lahir dari semangat nasional semacam ini adalah Indonesia.

Di samping itu, ada lagi satu pengertian *nation* yang beranjak dari adanya ikatan-ikatan etnis dan persamaan-persamaan primordial. Sifatnya lebih homogen. Contoh negara dari pengertian ini adalah Pakistan, Bangladesh, dsb.

Pertanyaannya sekarang menurut Clemens (1998), apakah konsep *nation* tersebut menguntungkan atau merugikan? Pertanyaan ini timbul karena memang di dalam dunia nyata kita bisa menemukan

manfaat darinya, yaitu bahwa mereka memberi energi bagi pembentukan kebudayaan dan membangun negara. Namun, di lain pihak kebanyakan perang yang terjadi semenjak tahun 1945 didasarkan pada adanya kebencian atas kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jutaan orang terbunuh dan lebih banyak lagi yang menjadi pengungsi.

Satu contoh klasik betapa sebuah entitas yang berpengaruh di dunia internasional tiba-tiba runtuh hanya karena bagian-bagiannya merasa bahwa mereka harus pisah dari pusat adalah kekhalifahan Turki Ottoman (Utsmaniyah). Contoh yang sama adalah seperti yang terjadi pada Uni Soviet. Persamaan diantara keduanya adalah salah satu elemen utama pecahnya entitas tersebut tidak bisa dipungkiri adalah semangat nasionalisme. Dunia kita terkoyak diantara kekuatan-kekuatan yang mempersatukan dan memecah kemanusiaan. Nasionalisme beroperasi di semua level hubungan internasional. Di level pertama, nasionalisme memberi inspirasi kepada individu untuk berkreasi dan untuk menghancurkan, di level kedua ia memberikan energi dan mengoyak keseluruhan negara, di level ketiga ide negara-bangsa memberikan prinsip-prinsip organisasi dari sistem internasional, namun ia menghalangi gerakan dari anarkisme menuju ke sebuah otoritas supranasional, di level keempat nasionalisme iredentis merupakan sebuah gerakan transnasional yang kuat, dan di level kelima kekerasan dari nasionalisme mengancam keseluruhan biosfer.

Mengapa sebagian masyarakat dapat hidup harmoni sementara yang lain tidak? Hal ini bisa dikaitkan dengan hubungan antara mayoritas dengan minoritas di dalam suatu masyarakat. Agar tercapai suatu keharmonisan, maka ada beberapa panduan yang bisa ditempuh. Untuk kelompok mayoritas yang dominan:

- Munculkan rasa partisipasi, kesempatan yang sama, dan perolehan yang saling menguntungkan diantara seluruh anggota masyarakat. Hindari tirani mayoritas;
- Terima adanya perbedaan;
- Kemakmuran merupakan hasil dan alat dari keharmonisan etnik;
- Hentikan pertentangan yang ada yang berdasarkan pada isu etnis;
- Diskusikan secara terbuka apa yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan apa yang menjadi kepentingan masyarakat;
- Upayakan untuk memahami kelompok minoritas di dalam masyarakat;
- Beri dukungan terhadap bahasa dan kebudayaan mereka tapi tanpa mengarahkan kepada upaya separatis.

Untuk kelompok minoritas:

- Tingkatkan kepentingan tapi hindari provokasi yang tidak perlu. Lindungi dan perkuat kebudayaan tapi jangan memisahkan diri dari kebudayaan yang dominan;
- Jangan melupakan masa lalu, namun tetaplah hidup di dalam kondisi sekarang dan menatap ke masa depan;
- Jika menghadapi tekanan, coba untuk memobilisasi masyarakat internal.

Satu tulisan lain yang membahas masalah nasionalisme dalam konteks hubungan internasional adalah "Nationalism and International Society" yang ditulis oleh James Mayall (1990). Seperti halnya Clemens, Mayall juga membahas mengenai *national self-determination* (NSD) di dalam tulisannya. Perbedaannya adalah bahwa Mayall sekedar memberi gambaran mengenai keterkaitan antara kedaulatan dengan NSD secara historis sementara Clemens lebih memfokuskan pada analisis mengenai perbandingan teori dengan kenyataan yang diilustrasikan dengan contoh kasus: dalam konteks politis, mengapa AS tetap bertahan sementara dua kekaisaran Rusia tidak mampu?; dalam konteks ekonomi, mengapa Singapura makmur sementara Sri Lanka yang sama kecilnya terpuruk?; dan dalam konteks pluralitas, mengapa Swiss dapat makmur dan harmonis sementara Yugoslavia (sebelum tercerai-berai) tak henti-hentinya berperang?

Mayall secara tegas menyayangkan kurangnya studi mengenai nasionalisme ini, baik dalam hal yang bersifat politis maupun dalam konteks nasionalisme ekonomi. Hal ini menurutnya menurutnya sebagai akibat dari kecenderungan untuk menerjemahkan HI itu lebih sebagai hubungan antarnegara daripada hubungan antarbangsa.

Meskipun konsep pembentukan negara modern sekarang ini pada umumnya didasarkan pada prinsip *nation-state*, namun tidak berarti di dalam kenyataan, hubungan internal yang ada selalu bersifat harmonis. Hal ini tidak saja berbahaya secara internal tapi bisa juga meluas mencakup skala regional atau bahkan internasional yang bisa menjadi pemicu perang besar. Oleh karena itu, peran pihak ketiga—dalam hal ini mungkin PBB, negara lain, NGO, atau bahkan individu—sangat diperlukan untuk meredakan atau mencari jalan keluar bagi konflik yang terjadi. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih, diantaranya:

- Membantu melalui mediasi;
- Intervensi dengan kekuatan untuk menjaga perdamaian atau membuat perdamaian;
- Memakai ancaman sanksi dan bantuan ekonomi bersyarat;
- Merevisi dan meningkatkan hukum internasional agar dapat lebih memberikan perlindungan dan suara bagi kelompok minoritas di dalam organisasi internasional, dsb.

Mari kita beri perhatian lebih terhadap metode mediasi. Mediasi diartikan sebagai proses dari manajemen konflik yang di dalamnya pihak luar atau pihak ketiga membantu pihak-pihak yang bertikai mengakomodasikan perbedaan-perbedaan mereka. Tujuan dari mediasi adalah untuk mengubah empat elemen: persepsi, pendekatan, tujuan dan tingkah laku.

Mediasi akan berakhir sukses jika pertentangan yang ada sudah dalam kondisi "matang". Maksudnya adalah para pihak yang bertikai akan mempersilahkan proses mediasi jika pertentangan mereka sudah berlangsung lama dan kompleks, sementara negosiasi diantara mereka telah mengalami jalan buntu. Di sisi lain, biaya dari berlanjutan konflik akan sangat menyakitkan. Barston (1992) menambahkan tiga faktor lagi yaitu pemeliharaan kerahasiaan, penggunaan mediator informal dan kekuatan asing dengan tanpa atau campur tangan langsung yang terbatas, serta peran formula yang menyeluruh yang digunakan untuk membangun persetujuan-persetujuan.

Satu hal yang menurut penulis kurang dielaborasi oleh Clemens adalah masalah klasifikasi nasionalisme itu sendiri. Seperti yang penulis nyatakan di bagian awal tulisan, secara sederhana nasionalisme dapat dibedakan menjadi dua: nasionalisme yang berdasarkan konsep Renan, dan nasionalisme yang berdasarkan persamaan primordial. Bagi penulis pribadi, nasionalisme yang kedua relatif lebih bisa bertahan dan

bersifat "aman" daripada yang pertama. Ketika musuh bersama atau kepentingan yang semula dianggap sama kemudian memudar maka potensi untuk pecah sangat terbuka di dalam konsep nasionalisme yang pertama. Indonesia sekarang ini merupakan contoh yang jelas.

Selain itu, ada lagi pengklasifikasian nasionalisme secara khusus, yang biasanya dikaitkan dengan elemen lain, seperti nasionalisme religius, nasionalisme kebangsaan, dsb. Dalam hal ini, sepertinya Clemens masih berpegang pada prinsip dasar nasionalisme bahwa ia bersifat sekuler. Padahal ada kecenderungan baru bahwa konsep nasionalisme modern telah meredusir sedemikian rupa nilai-nilai sekuler itu sehingga muncullah kemudian apa yang kita kenal dengan istilah nasionalisme-religius.

Bagaimanapun juga, ada nilai positif yang bisa kita petik dari kedua tulisan mengenai nasionalisme di dalam konteks hubungan internasional ini, baik yang ditulis oleh Clemens maupun oleh Mayall. Dari keduanya kita memahami bahwa nasionalisme adalah seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ia memberikan energi ke dalam negara, namun di sisi yang lain ia merupakan ancaman laten yang siap menghancurkan negara sebesar dan sekuat apapun. Oleh karena itu, masalah nasionalisme ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah internal. Ia sudah menjadi obyek dari studi HI dan harus terus mendapat perhatian yang besar. Konflik etnis atau ras yang terjadi di

dalam suatu negara, akan dapat menjadi *trigger* bagi terjadinya perang besar di dunia internasional.

Clemens menekankan pentingnya peran mediasi sebagai salah satu metode di dalam mencari penyelesaian konflik yang bernuansa nasionalisme. Hal ini berkaitan dengan adanya kepedulian dari pihak ketiga agar konflik yang bersifat internal tidak meluas dan merugikan pihak-pihak lain.

Sementara Mayall memberikan gambaran mengenai dampak dari proliferasi konflik bernuansa etno-nasionalis ini di masa pasca Perang Dingin, khususnya di mandala Eropa. Peningkatan konflik ini tidak saja akan membuka kembali pertanyaan sekitar rasionalitas strategis dari integrasi Eropa (secara keseluruhan), tetapi juga meluas kepada perdebatan pada isu- isu lain yang signifikan seperti masalah demokratisasi, keterkaitan antara agama dan kepercayaan, dan kemungkinan bahwa globalisasi di dunia internasional yang belakangan ini gencar dibicarakan akan lebih diwarnai dengan adanya fragmentasi nasional dan etnis yang semakin meningkat daripada oleh adanya integrasi.

Berpijak pada pemikiran Clemens dan Mayall di atas, nasionalisme tidak selayaknya hanya mencuat untuk merespon isu-isu yang sifatnya sesaat. Sepatutnya nasionalisme juga ditunjukkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan menonjolkan identitas unsur-unsur ke-Indonesiaan sebagai identitas kebangsaan. Keragaman

yang ada tersebut harus menjadi alat harmonisasi bangsa, menjadi modal besar serta dasar bagi identitas kolektif yang melahirkan nasionalisme kultural, dan bukan sekadar nasionalisme politis (Agung, 2017). Di titik ini, pemerintah perlu memformulasikan, mendefinisikan, dan mengkaji ulang secara bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa mengenai konsep identitas bangsa Indonesia, dan mengukur nasionalisme masyarakat Indonesia.

Mengutip sinyalemen Mayall bahwa globalisasi sangat mungkin meningkatkan fragmentasi bangsa tinimbang integrasi, sudah sangat urgen identitas bangsa untuk terus dibahas dan diingatkan mengingat Indonesia harus tetap dan terus berperan aktif di kancah pergaulan internasional.

Satu hal juga yang tidak kalah penting dari identitas bangsa itu sendiri adalah mekanisme pencarian solusi ketika terjadi gejala disintegrasi baik yang bersifat intranasional maupun internasional, sebuah mekanisme yang mumpuni dalam melihat akar permasalahan terkait identitas bangsa. Indonesia sudah mempunyai semacam BPIP (Badan pembinaan Ideologi Pancasila) yang ditujukan menjaga identitas bangsa melalui ideologi Pancasila. Di level Asia Tenggara, Indonesia juga telah mengusung narasi mengenai identitas ASEAN bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sebagai upaya mencari nilai-nilai kesamaan agar bisa meminimalisasi fragmentasi.

Upaya pencarian identitas bangsa bukanlah sebuah pencarian yang sederhana. Namun, bukan berarti ini menjadi sebuah upaya yang tidak

perlu didorong, bahkan harus didorong secara terus-menerus dengan diimbangi semangat nasionalisme namun dalam konteks pergaulan internasional yang menghormati nilai-nilai kesamaan yang inheren.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Darma, Memperkokoh Identitas Nasional untuk Memperkokoh Nasionalisme, WiRA: Media Informasi Kementerian Pertahanan, edisi November-Desember 2017 vol. 69 no. 53, hal. 6-12.
- Barston, R.P., *Modern Diplomacy*, Longman House, England, 1992, p. 216.
- Clemens, Walter, Jr., *Dynamics of International Relations: Conflict and Mutual Gain in an Age of Global Interdependence*, Rowman and Littlefield Publishers Inc., 1998, p. 215-241.
- Mayall, James, *Nationalism and International Society*, Cambridge University Press, 1990, hal. 182-189.